

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat faktor teknis yang dianggap menghambat dan mendukung. Faktor yang mendukung dalam implementasi Formularium Nasional adanya dukungan dari direktur rumah sakit dalam melakukan sosialisasi penggunaan obat formularium nasional di lingkungan rumah sakit sedangkan faktor yang menghambat adalah lama proses terkait regulasi pengadaan di distributor obat ataupun tidak semua item obat Formularium Nasional yang tayang di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

Dengan menghubungkan pada teori hukum yang digunakan yaitu Teori Kebijakan, dokter sebagai pelaku kebijakan cenderung menolak obat-obat yang ada di formularium karena menganggap kurang efektif untuk diresepkan pada pasien.

Pembuat kebijakan yaitu direktur sebagai pimpinan rumah sakit dalam membuat kebijakan dapat menggunakan hasil evaluasi yang sudah dilakukan oleh instalasi farmasi bersama dengan komite farmasi dan terapi, agar dalam pelaksanaannya dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama dan lebih optimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Formularium Nasional di rumah sakit swasta kota Padang dilaksanakan dengan membuat kebijakan untuk membentuk Formularium

Rumah Sakit yang diturunkan dari Formularium Nasional, disahkan oleh direktur sebagai pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan atau Peraturan Direktur untuk digunakan oleh setiap dokter saat persepan guna memberikan terapi yang efektif kepada pasien.

2. Kendala rumah sakit swasta dalam memberikan hak pasien BPJS atas Formularium Nasional yaitu: Pengadaan obat yang sering kosong pada Aplikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), dokter yang tidak patuh pada saat persepan sehingga sering tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit yang sudah ada dan pasien sendiri yang beranggapan bahwa obat dalam Formularium Nasional adalah obat yang kurang bermutu.

B. Saran

Terkait dengan implementasi kebijakan penggunaan Formularium Nasional untuk pasien BPJS di rumah sakit swasta kota Padang ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Direktur rumah sakit

Lebih intensif melakukan sosialisai guna meningkatkan kesadaran dokter dalam membuat resep sesuai dengan Formularium Nasional. Memberikan *Reward* kepada penulis resep sesuai formularium rumah sakit atau *Punishment* bila tidak menggunakan obat sesuai formularium rumah sakit.

2. Instalasi Farmasi

Instalasi farmasi memastikan obat yang ada dalam Formularium Rumah Sakit tersedia dalam *e-Catalogue* sehingga diharapkan pengadaannya lebih cepat dan segera berkoordinasi kembali pada distributor obat jika dalam pengadaannya terlalu lama. Apoteker agar meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan dokter melalui Komite Farmasi dan Terapi dan Komite Medik.

3. Dokter

Saat menuliskan resep agar melaksanakan Kebijakan Direktur atau Peraturan Direktur untuk menggunakan Formularium Nasional dan Formularium rumah sakit sebagai acuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta
- Amiruddin, 2018, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- I Ketut Swarjana, 2015, *Metode Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta
- Dewa Gede Atmadja dan Putu Budhiartha, 2018 *Teori-teori hukum* Setara press (*Intrans Publishing Group*), Malang
- Gemy Nastity Handayany, 2022, *Manajemen Farmasi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu, Surabaya
- Salim dan Erlies Septiani Nurbani, 2013, *Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Samodra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Hukum Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/Menkes/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/KMK-200/2020 tentang Pedoman Penyusunan Formularium

Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.03/111/1346/2014 tentang Pedoman Penerapan Formularium Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

C. Sumber lain

Sidhi Laksono, Farhan Kurnia Pratama, Ilham Akbar, Devana Alifia Afifah, Putri Nur Laila Sunandar, Putri Salsabila Ediati, 2022, Cara Penulisan Resep yang baik dan benar untuk dokter umum : Tinjauan singkat, *Human Care Jurnal*, Volume 7, nomor. 1

Kompas online, Apakah ada obat –obatan yang tidak ditanggung bpjs kesehatan, <https://www.kompas.com>

Detik online, Kronologi viral balita kena penyakit langka tidak ditanggung bpjs kesehatan <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6302899/>

Kelda Ayu Fitriani dan Bambang Eko Turisno, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Kesehatan Dalam Prosedur Pembedahan yang Biaya Pengobatannya Melebihi Tarif INA CBGs*, *Notarius*, volume 11, nomor. 1

Vinandita Nabila Karina, Mokhammad Khoirul Huda, dan Mohammad Zamroni, 2022, “Physician” s Legal Responsibilities in Providing Medicines Outside the National Formulary to National Health Insurance Participants” *Soepra: Jurnal Hukum Kesehatan* Volume 8, Nomor. 2

Endang Yuniarti, 2019, Rationing Sebagai Upaya Penyesuain Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Obat Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit, <http://etd.respiratory.ugm.ac.id/>

- Hana Haryani, 2016, Pengadaan obat sesuai Fornas dan e-catalogue terkait penerapan JKN melalui BpJS dengan pendekatan Balanced Scorecard, Stikes Sukabumi, *Jurnal Ummi* Volume 81
- Syahdu Winda, 2018, Formularium Nasional (FORNAS) dan e-Catalogue Obat sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), *INTEGRITAS*, Desember
- Kapioru, Evan, Harlan. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Nominal* Volume III Nomor 1
- Pudjirahardjo, W. j. (1999). www.kebijakan_kesehatan.co.cc/2009/09/Pengertian_Kebijakan.html. <https://idr.uin-antasari.ac.id/15229/9/>
- Satjipto Rahardjo, 1993, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, *Jurnal Masalah Hukum* 10, 121